

## Sekolah Kebhinnekaan: Potret Kebijakan Internal SMA Negeri di Mataram

Fathurrohman Husen\*, Azaki Khoirudin\*\*

\*Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Email: fathurrohman.husen@iain-surakarta.ac.id. \*\*Mahasiswa Doktoral Pemikiran Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: azakikhoirudin@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan internal sekolah yang menunjukkan inklusivitas karakter toleran pada peserta didik yang majemuk. Fokus penelitian pada kebijakan inklusif dalam arti keadilan, kesetaraan, dan sikap positif terhadap kemajemukan agama. Sekolah berperan untuk memenuhi hak peserta didik dalam keberagaman. Menjadi masalah, jika lembaga sekolah diskriminatif atau tidak memfasilitasi pendidikan kerohanian peserta didiknya. Studi kasus penelitian adalah SMAN 1 Mataram dan SMAN 5 Mataram. Penelitian ini adalah *field research* dengan teknik penggalan data observasi kegiatan peserta didik yang mencakup: organisasi, kerohanian, aturan hari libur agama, ketersediaan tempat ibadah; dan wawancara mendalam kepada peserta didik, guru, dan pelaku kebijakan sekolah. Hasilnya, kedua sekolah tersebut menerapkan institusionalisasi ide menjadi kebijakan. Di antara kebijakan tersebut: melaksanakan kegiatan imtaq (iman dan taqwa) sesuai agama peserta didik; memberikan izin pembentukan organisasi rohani; fasilitas tempat maupun alat ibadah multi-agama; memfasilitasi guru rohani di setiap agama yang dipeluk oleh peserta didik; dan kebijakan libur fakultatif. Pemahaman masyarakat di wilayah sekolah tentang keberagaman suku, bahasa, dan agama yang praksis (tidak teoritis) menjadikan modal penting dalam kelangsungan toleransi di sana. Meskipun kedua sekolah tersebut tidak mewakili kebhinnekaan dalam hal suku dan etnis, setidaknya agama peserta didik yang berbeda-beda mewakili cerminan dari Indonesia yang beragam.

**Kata Kunci:** sekolah kebhinnekaan, kebijakan internal sekolah, karakter toleran, Mataram

### Abstract

*This article aims to analyze the school's internal policies on the inclusiveness of the tolerant characters of diverse learners. It focuses on inclusive policies in terms of justice, equality, and positive attitudes towards religious pluralism. Schools play a role in fulfilling the rights of students in observing their religions. It becomes a problem if school institutions are discriminatory or do not facilitate the spiritual education of their students. This study is case studies at SMAN 1 Mataram and SMAN 5 Mataram. This research is field research with data mining techniques through observing student activities which include: organization, spirituality, rules for religious holidays, religious facilities; and in-depth interviews with students, teachers, and school policy actors. As a result, both schools implemented the institutionalization of ideas into policies. Among these policies: carrying out imtaq (faith and taqwa) activities according to the student's religions; granting permission to form a religious based organization; facilities for places and tools of multi-religious worships; providing religious teachers for each religion embraced by students; and facultative holiday policies. The school community's awareness on practical (non-theoretical) ethnic, linguistic and religious diversity is instrumental in sustaining tolerance values. Although the two schools do not represent diversity in terms of ethnicity, at least diversity of religions of the students represents the diversity of Indonesia.*

**Keywords:** diversity school, school internal policy, tolerant character, Mataram

\* Naskah diterima Februari 2022, direvisi April 2022, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2022

<https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.570>

Dialog, 45 (1), 2022, 111-126

<https://jurnal.dialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

## Pendahuluan

Provinsi NTB memiliki dua pulau terbesar yaitu pulau Lombok yang terletak di barat dan Pulau Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Pulau ini dihuni oleh penduduk yang mayoritas masyarakat muslim. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa penduduk mayoritas di Mataram adalah Islam (82,36%), selanjutnya Hindu (14,17%), Kristen (1,60%), Katholik (0,84), Budha (1,02), dan Khong Hu Cu (0,01)(BPS, 2020). Di pulau ini juga memiliki banyak masjid yang tersebar di kabupaten-kabupaten. Masjid-masjid megah dan mewah akan dengan mudah dijumpai di setiap desa di sepanjang perjalanan di pulau ini. Dalam Sistem Informasi masjid oleh Kementerian Agama terdata 5.149 masjid dan 3.143 Musala, dengan rincian 1 Masjid Raya, 6 Masjid Agung, 107 Masjid Besar, dan 4.498 Masjid Jamik (SIMAS, 2022). Begitu banyak masjid yang tersebar di setiap empat kabupaten, mulai dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan yang terbaru Lombok Utara, hingga ke wilayah kota Mataram. Tidak mengherankan, jika wilayah ini dijuluki sebagai "Pulau Seribu Masjid".

Meskipun masyarakat mayoritas Muslim, Pulau Lombok dapat dikatakan sebagai representasi masyarakat yang majemuk dan pluralis. Majemuk ditunjukkan dengan keragaman suku, bahasa, dan agama yang ada di Lombok. Nilai plural ditunjukkan dengan kondisi di Lombok yang sebagian besar penduduknya muslim, juga banyak umat Hindu, Kristen Protestan, Katholik, Budha, Khonghucu dan lain-lain dengan sejarah kedatangannya masing-masing. Beragamnya agama di Lombok tentu menuntut adanya "toleransi" yang harus terus dirawat oleh antar-pemeluk agama. Di tengah maraknya isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) di sekolah penting untuk meneliti apa yang menjadi "daya tahan" merawat *unity in diversity* (kesatuan dalam keragaman). Misalnya, kasus SMK N Padang, Sumatera Barat yang mewajibkan seragam hijab bagi peserta didik nonmuslim (Sindonews, 2022). Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di Mataram, namun

kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya cukup kuat.

Fokus kebhinnekaan dalam penelitian ini adalah keragaman agama peserta didik di lembaga sekolah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kebijakan internal sekolah (*institutional ide*) yang menunjukkan inklusivitas karakter toleran pada peserta didik yang beragam dalam agama sehingga membentuk paham kebhinnekaan di sana. Artikel ini adalah hasil penelitian yang fokus pada dua sekolah negeri di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu SMA Negeri 1 Mataram (selanjutnya juga disebut SMANSA) dan SMA Negeri 5 Mataram (selanjutnya juga disebut SMALA). Kedua institusi sekolah ini merupakan sekolah favorit yang diminati oleh masyarakat setempat. Sebagaimana dilansir dalam portal berita NTB, Radar Lombok (2021), dijelaskan bahwa kedua sekolah ini masuk dalam lima sekolah terbaik di sana versi LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi). Konon, ketika penerimaan peserta didik baru masyarakat mengidamkan kedua sekolah ini. Jika tidak diterima di SMANSA, maka pilihan alternatif kedua adalah SMALA. Kebetulan keduanya terletak di jantung kota Mataram. Oleh karena itu, barangkali kedua sekolah ini cukup mewakili atau dapat dikatakan merepresentasikan profil masyarakat NTB, khususnya Kota Mataram, sehingga dapat diketahui bagaimana pihak sekolah membuat kebijakan internal guna menjaga kebhinnekaan.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan korelasi kebijakan sekolah, toleransi, dan kebhinnekaan. Riset terdahulu yang berkaitan dengan peran kebijakan internal sekolah, antara lain: penelitian di Kota Banda Aceh yang hendak menggerakkan peserta didik untuk lebih peduli pada lingkungan, maka dibuatlah kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, hasilnya adalah meningkatnya literasi ekologis peserta didik. Pengaruh tersebut didapat dari hasil survei pada sepuluh sekolah yang telah mengikuti program Adiwiyata, program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Desfandi et al., 2017). Serupa dengan itu, Isnaeni (2013) pernah

melakukan riset di Gresik dengan metode kualitatif tentang bagaimana implementasi kebijakan sekolah yang peduli lingkungan. Kurniawan et al., (2019) juga melakukan riset tentang pengendalian gadget pada anak usia sekolah melalui lembaga pendidikan, disimpulkan bahwa penegasan aturan yang didukung oleh kerja sama antar-guru dan wali mempengaruhi pengendalian penggunaan gadget lebih bijak. Terkait dukungan wali terhadap kebijakan sekolah, Taufan & Mazhud (2014) meneliti peran kebijakan kepala sekolah dalam komitmen mewujudkan pendidikan inklusif di Jambi, yaitu dengan membangun pemahaman pendidik akan perbedaan kebutuhan peserta didiknya; kurikulum yang fleksibel; dan kolaborasi dengan donatur dalam penyelenggaraan fasilitas ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Lebih teknis, Solihuddin (2013) menemukan cara mengendalikan perilaku dan membentuk karakter peserta didik dapat dilakukan dengan menetapkan poin setiap pelanggaran aturan sekolah dengan konsekuensi hukuman setiap tingkatan poin, namun hal ini perlu dilakukan secara kolaboratif antar-elemen sekolah (guru, karyawan, peserta didik) serta pembinaan oleh kepala sekolah.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu ini disimpulkan bahwa kebijakan sekolah sangat berpengaruh pada suasana dan ketertiban yang diinginkan. Perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan internal sekolah menjadi wahana kebhinnekaan, mengingat masyarakat di Indonesia adalah majemuk, baik dari suku, bahasa, dan agama.

Urgensi paham kebhinnekaan berimplikasi pada sikap toleran. Riset terdahulu terkait hal ini pernah dilakukan. Misalnya, pengajian diyakini sebagai *local wisdom* di Indonesia yang dapat merekatkan jiwa kebhinnekaan, sebagaimana Widiyanarti (2017) menyimpulkan perlunya komunikasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat Medan akan pentingnya persatuan NKRI untuk menangkal isu SARA, dalam hal ini melalui media pengajian Al-Qur'an. Qawaid (2013) juga mengidentifikasi tentang munculnya sikap intoleran peserta didik di Jawa dan Sulawesi

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terkait latar paham keagamaan dan lingkungan. Karenanya, mestinya keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menanggulangi sikap intoleran di sekolah. Dalam penelitian Qawaid, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dituntut untuk berimprovisasi menyampaikan penguatan paham agama yang moderat. Motivasi kepada guru PAI untuk lebih profesional perlu dilakukan, seperti dalam menilai perilaku peserta didik, menentukan media, dan metode pembelajarannya. Lain halnya dalam penelitian ini, bahwa pemahaman moderasi beragama diwajibkan melalui kebijakan yang dibuat oleh internal sekolah. Misalnya, dengan menyediakan guru-guru kerohanian sesuai agama peserta didik.

Riset terbaru, Supardi & Rahmelia (2020) menyimpulkan bahwa pemuda di kota Palangkaraya (red-masa Sekolah Menengah Atas) adalah pihak yang paling rawan bersikap radikal dan intoleran. Dijelaskan, hal ini disebabkan oleh pemahaman tentang hakikat iman dan aktualisasi diri, tentang kemanusiawian yang kurang matang. Akibatnya pemaknaan hidup dinilai kurang dan berakibat pada kurangnya sikap toleransi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu maka objek implementasi dan perkembangan paham kebhinnekaan pada peserta didik usia muda masih relevan diteliti.

### **Kebijakan Internal Sekolah dan Kebhinnekaan**

Pengertian kebijakan secara umum dijelaskan sebagai instrumen yang berisi tujuan-tujuan, berbagai prinsip, dan peraturan-peraturan yang menjadi pembimbing suatu organisasi. Terbentuknya kebijakan tersebut tergantung pada proses formulasi, implementasi, dan evaluasinya (Taufan & Mazhud, 2014). Kebijakan lembaga pendidikan, berarti menjadikan lembaga sebagai wadah untuk mengatur nilai-nilai moral, etika, dan akhlak. Sebagaimana diketahui, bahwa berkumpulnya peserta didik yang beragam latar belakang agama, ras, dan bahasa dapat disatukan dalam lembaga pendidikan yang satu

dengan tujuan mengembangkan intelektual (Effendi et al., 2019). Lembaga pendidikan di jenjang pra-Perguruan Tinggi disebut juga dengan sekolah. Sekolah didefinisikan sebagai tempat untuk menerima dan memberi pelajaran (Taufan & Mazhud, 2014). Karenanya, dapat disimpulkan, bahwa kebijakan internal sekolah merupakan instrumen yang disusun, selanjutnya digunakan untuk pedoman mencapai suatu tujuan dan dilakukan oleh organisasi sekolah yang memiliki kepentingan pengajaran. Keberhasilan kebijakan internal sekolah dapat dinilai dari sejauh mana implementasinya dan diukur dengan adanya evaluasi. Misalnya, memupuk sikap toleran antar-masyarakat di Indonesia dapat bermula dari sekolah. Termasuk dengan cara menetapkan kebijakan internal sekolah untuk menekankan nilai kebhinnekaan dalam mata pelajaran. Setidaknya ada dua pengorganisasian untuk menangkul radikalisme di lembaga pendidikan, yaitu: 1) pengorganisasian peserta didik secara heterogen dan 2) pengorganisasian peserta didik untuk berbagi inspirasi (Effendi et al., 2019). Maksud peneliti sebagai kebijakan sekolah adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dalam pengelolaan sekolah.

Bhinneka Tunggal Ika adalah falsafah Negara Indonesia. Falsafah tersebut juga dapat dikatakan sebagai konsep persatuan yang diamalkan secara integratif-pluralis, selanjutnya direalisasikan dalam pasal UUD 1945 (Anas, 2019). Penekanan falsafah ini ingin mengikat perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu tujuan, yaitu mewujudkan Negara yang merdeka. Dalam kitab Negara Kartagama (masa Majapahit) disebutkan *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangarua*, yang artinya: meskipun agama-agama terlihat berbeda bentuk akan tetapi hakikatnya satu jua. Menyadari keberadaan agama yang plural di Indonesia merupakan tujuan dari kemerdekaan itu sendiri. Dibutuhkan wadah yang sistematis untuk membentuk karakter kebhinnekaan di masyarakat Indonesia. Karenanya, kebijakan sekolah yang pro-kebhinnekaan dapat

memupuk persatuan, pemenuhan hak peserta didik, menanggalkan ego masing-masing agama, sehingga tidak terjadi radikalisme di masyarakat. Idealisme seperti inilah yang peneliti sebut sebagai sekolah kebhinnekaan. Urgensi penelitian ini bukan hanya sebagai bentuk terlalu permisif terhadap masuknya kelompok radikal di sekolah, namun juga kerap lepas pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dikelola oleh kelompok-kelompok ini (sekolahan).

Sekolah kebhinnekaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah menjadikan sekolah sebagai wadah untuk mengajarkan, memahami, dan mengamalkan nilai kesadaran akan keragaman. Keragaman tersebut tidak hanya dari aspek bahasa, suku, dan ras, namun juga agama. Mengamalkan kebhinnekaan penting dilakukan untuk mengakomodir peserta didik yang majemuk. Proses tersebut tentu tidak dapat terlaksana dengan baik, jika sekolah sebagai pihak yang menjadi sumber rujukan generasi bangsa (red-peserta didik) tidak menganggapnya penting dan menetapkan kebijakan pro-kebhinnekaan. Hal ini yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana sekolah sebagai lembaga pembentuk kesadaran kebhinnekaan melalui kebijakan-kebijakan internalnya. Cakupan kebijakan tidak hanya saat pembelajaran di kelas, juga pada kegiatan keorganisasian, fasilitas ibadah, hak libur hari besar agama, ketersediaan buku referensi umum maupun keagamaan, serta ketersediaan pendidik kerohanian sesuai agama masing-masing peserta didik.

Secara operasional, kebhinnekaan diindikasikan dengan empat poin berikut: (1) rekognisi (aspek keberterimaan), di antaranya meliputi akses terhadap layanan pendidikan, akses terhadap kaum difabel, akses terhadap fasilitas tempat ibadah, praktik yang membatasi kelompok tertentu, dan pemaksaan sebuah nilai berdasarkan keyakinan tertentu; (2) representasi (aspek politik), di antaranya meliputi keterwakilan di ekskul, keterwakilan di organisasi kesiswaan, dan keterwakilan di tenaga pengajar; (3) redistribusi (aspek sosial-ekonomi), di antaranya meliputi akses

mendapatkan dana sekolah dan akses mendapatkan beasiswa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan model pemilihan informan secara proporsional berdasarkan argumentasi pemangku kebijakan dan derajat akurasi informasi yang diambil. Peneliti menganalisis secara deskriptif, bukan statistik sesuai dengan studi kasus yang dialami (Moleong, 1990). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni wawancara secara tatap muka dan observasi lapangan. Observasi lapangan untuk memverifikasi ujaran-ujaran, berupa jargon, yang dilontarkan oleh informan selama proses wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan guna mendapatkan data-data faktual dan kultur yang biasanya menjadi hegemoni di sekolah. Pihak yang diwawancarai sudah ditentukan kriteria dan menuliskan beberapa acuan/pedoman pertanyaan (Sugiono, 2020). Informan yang diwawancarai adalah pihak yang memahami kebijakan sekolah, antara lain: kepala sekolah, komite, guru agama Islam, dan guru Kewarganegaraan (PKN). Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pengurus OSIS dan Organisasi Keagamaan Peserta didik, mencakup: Ketua OSIS, Ketua Remus (Remaja Musala), Ketua CSF (Cristian Students Fellowship), Ketua Kerohanian Katolik, Seksi Puja Bakti Agama Budha, dan seksi KHS (Kerohanian Hindu SMANSA).

Pengambilan data lapangan dilakukan pada kurun waktu Januari-Februari 2017. Lokasi penelitian dilakukan pada dua tempat, yaitu SMA Negeri 1 Mataram dan SMA Negeri 5 Mataram. SMA Negeri 1 Mataram terletak di Jln. Pendidikan No. 1 Dasan Agung Baru, Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Posisi sekolah ini tepat disamping kiri kantor DIKPORA NTB. Adapun SMA Negeri 5 Mataram terletak di Jln. Udayana No. 2A, Mataram Barat, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat bertepatan sebelah dengan Masjid Islamic Center.

Kegiatan observasi dilakukan dengan mengunjungi dua lokasi sekolah tersebut

dengan mengamati berbagai aktivitas peserta didik yang dilakukan di sekolah dan kondisi fisik serta fasilitas yang ada di sana. *Pertama*, peneliti mengamati kondisi SMAN 1 Mataram, mencakup: penyediaan buku-buku di perpustakaan meliputi buku agama dan umum dan dipinjamkan sesuai kebutuhan. Di depan perpustakaan terdapat Musala untuk peribadahan peserta didik muslim, sedangkan rumah ibadah nonmuslim difasilitasi di ruang perpustakaan atau ruang kelas. Selain itu, observasi juga dilakukan pada proses belajar dan mengajar pendidikan agama Islam. Observasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan sekolah mengimplementasikan prinsip kebhinnekaan dalam fasilitas-fasilitas peserta didik yang berbeda agamanya.

*Kedua*, peneliti mengamati kondisi SMAN 5 Mataram. Secara umum, kondisi sekolah sudah representatif, namun secara fisik lebih luas SMAN 1 Mataram daripada SMAN 5 Mataram. Perpustakaan yang ada sudah tersedia buku-buku keislaman dan umum meliputi semua jurusan dan agama. Hal ini mengidentifikasi implementasi kebijakan sekolah untuk tidak diskriminatif dalam menyediakan referensi buku keagamaan bagi peserta didik. Observasi terhadap kegiatan peserta didik, tampak pada penerapan sikap sopan santun pada guru (bersalaman cium tangan) kepada guru setiap bertemu. Hal ini merupakan dampak daripada pengaruh Keislaman yang diprakarsai kegiatan di Masjid Islamic Center.

Wawancara mendalam dilakukan kepada tiga pihak, antara lain: pejabat Kasi Pengurusan SMA pada bidang pendidikan di DIKPORA Mataram; pihak SMAN 1 Mataram dan SMAN 5 Mataram, baik pejabat sekolah, guru, tendik, pengurus OSIS, dan peserta didik. Kegiatan wawancara dilakukan berturut-turut secara bergantian dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari pertama wawancara dilakukan kepada Kasi Pengurusan SMA pada bidang pendidikan bertempat di kantor DIKPORA NTB, Jln. Pendidikan No. 1 Dasan Agung Baru, Selaparang Kota Mataram. Pada hari kedua, kegiatan wawancara di SMAN 2 Mataram yang dilaksanakan secara bersama yakni: kepala

sekolah, komite, guru agama Islam, dan guru Kewarganegaraan (PKN). Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pengurus OSIS dan Organisasi Keagamaan Peserta didik, mencakup: Ketua OSIS, Ketua Remus (Remaja Musala), Ketua CSF (*Cristian Students Fellowship*), Ketua Kerohanian Katolik, Seksi Puja Bakti Agama Budha, dan seksi KHS (Kerohanian Hindu SMANSA). Kegiatan observasi dan wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan sekolah mengizinkan dan mengakomodir kegiatan keagamaan peserta didik, baik yang muslim dan nonmuslim. Selain itu, mengidentifikasi kebijakan sekolah menengah atas yang menerapkan kegiatan merdeka belajar yang digagas Nadiem Makarim.

Pada hari ketiga, wawancara kepada pihak SMAN 5 Mataram yang dilaksanakan di ruang kepala sekolah, antara lain: Kepala Sekolah, Waka Kepeserta Didikan, Komite Sekolah, dan Guru Agama, serta pengurus organisasi keagamaan peserta didik yang juga didampingi oleh masing-masing pembinanya. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan libur agama, fasilitas ibadah muslim dan nonmuslim, izin organisasi kerohanian, dan referensi buku umum dan keagamaan.

## Hasil dan Pembahasan

Sub bab ini menggambarkan secara gradual profil kebijakan, mekanisme implementasi kebijakan dan dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut antar sekolah dalam satu area. Dalam poin ini menjelaskan profil kebijakan sekolah, mekanisme implementasi kebijakan dan dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut disekolah SMAN 1 Mataram dan SMAN 5 Mataram.

### Profil Kebijakan Sekolah SMA Negeri 1 Mataram

Berdasarkan data peserta didik SMANSA jumlah peserta didik sebanyak 1.157 anak terdiri dari: Islam (891 peserta didik), Hindu (186 peserta didik), Budha (17 peserta didik), Katolik (18 peserta didik), dan Protestan (45 peserta didik). Bahkan menurut keterangan

sekolah yang Muslim juga beragam: mayoritas Nahdlatul Wathan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, Syiah, dan Salafi pun ada. Meskipun keberagaman agama tidak mencakup Konghucu, namun data ini menunjukkan keberagaman agama di sekolah. Data tersebut juga tidak bisa disebut miniatur Indonesia, namun dapat menjadi percontohan sekolah dalam menentukan kebijakan penerimaan peserta didik yang tidak diskriminatif.

Di dinding-dinding sekolah terpampang “Profil Peserta didik Berprestasi”, antara lain: Beriman (dapat membedakan baik dan buruk serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa); Jujur (bersikap berani berterus terang dan bertingkah laku terhadap diri sendiri serta orang lain); Kreatif (memiliki daya cipta yang unggul untuk dirinya dan orang lain); Percaya Diri (mempunyai pendirian yang teguh dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain); Disiplin dan Bertanggung Jawab (selalu tepat waktu dalam menjalankan tugas dan kewajiban); Peduli (selalu peka terhadap situasi dan kondisi di sekeliling, sehingga tergerak hatinya untuk membantu meringankan beban orang lain); dan Sopan (bertutur kata dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku).

Analisis peneliti, bahwa kalimat-kalimat yang dipasang di dinding tidak mengarah pada agama tertentu, namun lebih pada pembentukan karakter peserta didik. Karakter yang dimaksud, seperti percaya diri dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat agama; peduli dan bersikap sopan juga wajib diimplementasikan oleh agama apa pun. Begitu pula dalam hal iman yang menyebutkan Tuhan Yang Maha Esa, bukan sebutan Tuhan agama tertentu. Hal ini dapat berpengaruh pada sikap toleran peserta didik. Misalnya, telah dilakukan riset tentang pengaruh tulisan yang ditempel di dinding sekolah untuk membentuk karakter peserta didik pernah dilakukan. Misalnya, dalam meningkatkan kepedulian lingkungan sempat dianggap, bahwa pemasangan hiasan dinding yang berisi slogan atau kalimat positif tidak berpengaruh dibandingkan dengan mengadakan *outbond* (Ayuanita, 2017). Namun, riset terbaru (Haryati et al., 2020) menunjukkan

bahwa hiasan dinding sebagai bentuk ekstrakurikuler yang diintegrasikan dengan mata pelajaran berpengaruh untuk mewujudkan pendidikan karakter, yaitu ajaran Ki Hajar Dewantara yang dilakukakan di sekolah menengah pertama di Semarang). Pemasangan hiasan dinding ini dianggap sebagai implementasi teori Skinner tentang *Operant Conditioning*.

Dari hasil studi lapangan, ditemukan beberapa kebijakan terkait kebhinnekaan di SMAN 1 Mataram, antara lain:

#### 1. Imtaq (Iman dan Taqwa)

Dalam menjalankan agama di SMAN 1 Mataram punya kebijakan internal namanya Imtaq singkatan dari (iman dan taqwa). Imtaq pertama kali diadakan di SMAN 1 Mataram sebelum sekolah-sekolah lain mengikuti kebijakan ini. Kebijakan ini mulai ada sejak tahun 1990-an. Kegiatan ini terbagi menjadi tiga macam yaitu: Imtaq pagi, Imtaq Siang dan Imtaq Khusus (Jum'at).

Imtaq Pagi dilaksanakan pada (07.15-07.30) sebelum pelajaran dimulai. Bagi yang Muslim kegiatannya adalah mengaji pakai speaker yang terkoneksi ke dalam ruang-ruang kelas. Petugas dari Remus (Remaja Musala) membacakan Al-Qur'an, kemudian peserta didik muslim di dalam kelas mengikuti. Bagi yang non-Muslim kegiatannya juga membaca kitab dan berdoa bersama organisasi keagamaan peserta didik masing-masing didampingi oleh guru agamanya melakukan aktivitas agama di ruang yang sudah ditentukan.

Untuk Imtaq Siang kegiatannya adalah waktu salat Zuhur. Bagi peserta didik muslim berada di Musala, sedangkan non-Muslim di ruang yang sudah ditentukan. Ada yang di kelas, dan ada juga yang di perpustakaan.

Imtaq khusus (hari Jumat) kegiatan peserta didik biasanya mengaji bergiliran, ada yang menjadi pembawa acara (MC), membaca sari tilawah, berdoa, kemudian ceramah dari peserta didik dan ceramah dari guru, salat dhuha, pidato selama 1jam pelajaran. Menurut Bapak Kepala Sekolah, "Kita membangun ketaatan beragama peserta didik sesuai keyakinan agama masing-masing", sehingga memiliki komitmen ajaran agamanya masing-masing kuat dan

religiusitasnya tinggi tanpa adanya diskriminasi.

#### 2. Organisasi Keagamaan Peserta didik

Setiap peserta didik membentuk organisasi keagamaan di sekolah. Setiap organisasi ini diberikan pembinaan, yang mana pembinaanya termasuk dihonorirkan. Anak-anak membentuk pengurus organisasi dari masing-masing agama, untuk mengurus kegiatan peribadatan dan keagamaan masing-masing. Seluruh agama mendapatkan alokasi dana dari sekolah. Semua kerohanian memiliki rencana kegiatan selama setahun dan harus menyetorkan program kerja ke OSIS. Keragaman organisasi keagamaan ini dalam pandangan Sutrisno (2019) menunjukkan kegiatan memahami sikap untuk tidak bersikap intoleransi sehingga peserta didik dalam hal ini mampu menerima perbedaan sehingga bersikap moderat dalam beragama. Sebab, setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki tradisi moderasi dalam beragama, sehingga karakter masyarakat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud, tidak hanya sekadar dalam lagu atau teks-teks buku dan hiasan di dinding (Israpil, 2021). Berikut adalah gambaran singkat mengenai aktivitas dan kegiatan organisasi keagamaan peserta didik di SMANSA yang semua terintegrasi dengan program Imtaq sekolah (Interview, Eki dkk, 2017).

#### KHS (Kerohanian Hindu SMANSA)

KHS biasanya melaksanakan Imtaq Pagi dan Imtaq Siang dengan diisi kegiatan keagamaan yang mereka namakan Serada dan Bakti, jika hari Jumat dilaksanakan secara bersama-sama. Setiap bulan, peserta didik beragama Hindu bersembahyang bersama di Pura. Enam bulan sekali mereka merayakan Saraswati sembahyang bersama se-kota Mataram. Setiap 1 tahun sekali, biasaya mengadakan acara menginap di Pura semalam. Dimulai sore dan berakhir di pagi hari. Ada juga kegiatan ibadah Dharmasanti yang dilaksanakan setelah Nyepi. Kemudian Pawai Ogoh-Ogoh, yakni rangkaian kegiatan sebelum Nyepi. Selain itu, peserta didik KHS juga melaksanakan Resiyatnya yaitu bantuan untuk

pendeta dan Manusayatnya yaitu bantuan untuk sesama manusia atas dasar kemanusiaan.

Darmasanti dilaksanakan di sekolah dikemas dengan acara penampilan bakat peserta didik-siswi Hindu. Kegiatan ini juga mengundang OSIS, Kepala Sekolah, dan organisasi kerohanian yang lainnya. Terakhir, kegiatan yang disukai adalah perjalanan rohani keliling ke pura-pura di Lombok, serta Tirtayatra yang keliling pura tetapi keluar dari wilayah Lombok, yang pernah dilakukan dan terjauh adalah perjalanan ke Jawa Tengah.

### **Seksi Puja Bakti Agama Budha**

Peserta didik Budha berjumlah 17 orang. Setiap pagi mereka melaksanakan Imtaq di ruang kelas XI IPA 4. Kegiatan ruang kelas biasanya membaca Parita dan kadang ada tambahan dari Ibu Guru. Karena mereka tidak terikat dengan guru. Sudah terbiasa cukup dengan pemimpin Puja Bhakti. Jika hari Jumat mereka melakukan Imtaq bersama di kelas XI IPA 8 yang terdiri dari: ceramah agama dan menyanyi. Yang belum mereka lakukan adalah baksos. Mereka ingin dapat melaksanakan baksos seperti organisasi keagamaan peserta didik yang lain. Harapannya mereka ingin melaksanakan baksos lebih jauh lagi. Ingin studi tour di Borobudur. Meskipun demikian, mereka berterimakasih sebagai minoritas yang didukung dan masih mendapatkan dana dari sekolah.

### **Kerohanian Katolik**

Pada Imtaq pagi peserta didik beragama Katolik melakukan ibadat sabdah dan berdoa dengan buku panduan puji syukur. Ketika hari Jumat, mereka melakukan ibadat ekaristi (persembahan), namun perayaan ekaristinya tidak ada, adanya adalah ibadat sabdah. Kegiatan mereka di sekolah hanya Imtaq, di luar sekolah mereka menjadi tugas pelayanan di Gereja. Setiap tahun mereka merayakan Rekoleksi Paskah dan Rekoleksi Natal yang diikuti seluruh peserta didik Katolik se-Kota Mataram. Mereka juga ingin mengadakan baksos di sekolah, tetapi masih memikirkan mekanismenya. Sekolah mendukung dana dan fasilitas untuk kegiatan Bina Iman dan Bina

Mental di sekolah.

### **CSF (*Cristian Students Fellowship*)**

Sebagaimana organisasi keagamaan peserta didik yang lain, peserta didik Kristen Protestan melakukan Imtaq Pagi yang disisi dengan puji-pujian lagu, membaca kitab dan berdoa. Imtaq siang sama, hanya berbeda ketika berdoa yang diniatkan untuk kondisi bangsa dan pemimpin negeri ini. Adapun Imtaq Jumat dilaksanakan lebih besar. Karena ada pembawa acara bergiliran setiap minggu. Selama satu jam ada pengkhotbahnya, menyanyi, persembahan, mendengarkan khotbah. Yang bertugas menjadi pengkhotbah adalah kakak kelas yang sudah mulai lulus.

Peserta didik juga merayakan Natal dan Paskah yang didukung oleh sekolah berupa biaya dan tempat. Kegiatan ini juga mengundang sekolah lain. Dalam perayaan Natal dan Paskah juga ada ramah tamah makan bersama kepala sekolah dan guru.

Untuk peserta didik baru, CSF melakukan pembinaan rohani selama tiga hari. Dalam kegiatan tersebut para peserta didik *mensharing* firman Tuhan, berdoa, dan pendidikan supaya peserta didik mampu menjaga sikap atau akhlak di sekolah. Mereka berharap supaya sekolah dapat menyediakan tempat ibadah di sekolah seperti: fasilitas gitar untuk puji-pujian.

### **Remus**

Remaja Musala (Remus) adalah ekskul yang bertujuan menanamkan jiwa dakwah Ilahiyah untuk peserta didik yang ingin memperdalam ilmu Agama Islam. Di SMANSA, Remus mendapat tugas untuk mengelola Imtaq. Pada Imtaq Pagi peserta didik membaca al-Qur'an yang didengarkan oleh peserta didik di dalam kelas. Imtaq Siang: setelah Dhuhur biasanya membaca Hadits. Imtaq Jumat (khusus): giliran per kelas bergiliran untuk mendapatkan tugas mengisi. Mulai gelar karpet, mimbar, dan menyiapkan acara, mendengarkan pidato di lapangan.

Secara kultural, Remus ini masih dibina oleh para alumni. Setiap minggu ada kajian. Pada hari Senin kajian untuk umum atau seluruh warga sekolah. Sedangkan hari Kamis,

kajian untuk anggota Remus saja. Alumni betertugas membina, kadang juga mengisi). Alumni ini terikat dalam Ikatan Alumni Remus SMANSA (Irmansa). Alumninya membantu di pesantren kilat. Kajian Remus juga mengundang para doktor dari luar, rektor, profesor, tuan guru dari pesantren, juga guru-guru di sekolah.

Kegiatan Remus banyak sekali seperti: Kajian, Sanlat (Pesantren Kilat), Mablit, Outbond, Bakti Sosial, dan lainnya. Pada hari Jumat kegiatan Remus berkelompok-kelompok dengan tutor sebaya.

### 3. Pelibatan KPUD pada Pemilihan Ketua OSIS

Pemilihan OSIS sama betul, bahkan serupa dengan Pilkada. Hal ini dikarenakan selama proses pemilihan OSIS dibimbing dan ditemani KPU Propinsi NTB. Mulai dari proses panjaringan bakal calon, menjadi calon, debat visi dan misi, kampanye hingga pemilihan ditemani KPU NTB. Pelibatan KPUD ini sudah dilaksanakan dua tahun, sejak tahun 2015. Dan menjadi *pilot project* KPU NTB.

Untuk calonnya sebenarnya ada dari laki-laki maupun perempuan, namun hanya sempat menjadi BALON (Bakal Calon), tidak sampai menjadi calon. Kebetulan waktu pemilihan calon ketua dan wakil OSIS terdiri dari beragam agama. Akan tetapi perolehan suaranya kebetulan jauh, dan dimenangkan oleh yang muslim. Tetapi hal ini ditegaskan oleh Kepala Sekolah dan Guru PKN bahwa proses memilih bukan karena agamanya, namun profil peserta didik dan visi dan misi ketika debat kandidat.

Kriteria Ketua dan wakil ketua OSIS ditentukan oleh tiga hal yaitu: kemampuan akademik, restu orang tua, dan pandangan guru kepada calon. Pandangan guru ini maksudnya tidak melihat pasangannya, tetapi melihat profil pribadi peserta didiknya. Hal ini dilakukan ketika masih menjadi bakal calon. Jika tiga kriteria ini didapat, maka peserta didik diperbolehkan mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS.

### 4. Upacara Hari Senin

Upacara ketika hari senin adalah kegiatan rutin di SMAN1 Mataram. Kegiatan ini berfungsi menanamkan jiwa nasionalisme bagi

siwa dan warga sekolah yang lain. Untuk meningkatkan rasa dan kualitas nasionalisme berbangsa dan bernegara, sekolah selain Bapak dan ibu guru yang menjadi pembina upacara, maka biasanya juga mengundang Kapolres, Dandim, BNN, dan tokoh masyarakat lain yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

### 5. Penyediaan Guru dan Mata Pelajaran Agama bagi Peserta Didik

Kebanyakan guru agama adalah guru tetap PNS. Setiap agama disediakan buku-buku agamanya masing-masing. Di perpustakaan disediakan buku-buku agama sebanyak 835 buku dan filsafat 202 buku dari 10.908 judul dan 25.810 eksemplar. Untuk Guru agama ada yang tetap, ada yang honorer. Kebetulan guru yang beragama Kristen PNS tetap, Hindu PNS tetap, guru agama Budha PNS tetap, sedangkan Muslim 1 tetap dan 2 Honorer.

### 6. Pembentukan Karakter Utama

Peserta didik SMAN 1 diwajibkan untuk berperilaku: 1) mengucapkan salam kepada semua orang yang ada di sekolah termasuk tamu yang datang/berkunjung ke sekolah; 2) mengucapkan terimakasih; 3) memberikan informasi kepada tamu yang hadir di sekolah sesuai maksud dan tujuan (memberi petunjuk dan informasi); 4) mengantar tamu bila hendak berjumpa atau ada maksud/keinginan untuk menemui seseorang termasuk menanyakan dimana tempat toilet; 5) mempergunakan bahasa/berbicara yang santun dan ramah kepada guru/staf, semua peserta didik dan para tamu; 6) mengekspresikan rasa hormat kepada asal usul/suku, bahasa, agama, ide/pendapat, hak cipta, hak milik, orang tua dan status dalam keluarga; 7) meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahan; 8) memanggil kakak kelas menggunakan kata-kata "kak" atau "kakak"; 9) membiasakan diri mengambil sampah yang ada di sekitar; 10) berpakaian rapih dan bersih dan bersahaja di sekolah; 11) saling tolong menolong dalam hal yang positif.

### 7. Libur Fakultatif untuk Peserta didik Beragama Hindu

Peserta didik diberikan hak untuk melaksanakan libur karena melaksanakan aktivitas beragama. Di SMAN 1 Mataram, melaksanakan kebijakan "libur fakultatif"

untuk agama Hindu.<sup>1</sup> Kebijakan ini menjadi ketentuan resmi dari pemerintah.

Demikian juga hari-hari agama lain para peserta didik maupun guru diberikan hak yang sama. Peserta didik diberikan sarana aktualisasi merayakan agamanya di sekolah. Misalnya, merayakan Natal dan Idul Fitri.

Dalam skala lebih besar, PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) menjadi wadah dialog antara Islam, etnis Jawa, dan etnis Tiongho, sehingga dijelaskan dalam organisasi tersebut, bahwa adat etnis lebih mempengaruhi dimensi sosial budayanya daripada agama dan norma, meskipun di sisi lainnya terdapat pengurus yang berstatus muallaf (Kholis, 2019). Sebenarnya, kebijakan tentang hari libur fakultatif yang berkembang di Indonesia mengalami perkembangan ke arah yang lebih responsif kebhinnekaan, hanya saja pilihan menerapkan hari besar etnis maupun agama tidak sama antara perusahaan maupun lembaga, termasuk sekolah. Dijelaskan Imlek

---

<sup>1</sup> Hari-hari tersebut antara lain: Hari Raya Saraswati (melaksanakan persembahyangan dalam memperingati turunnya Weda), Hari Raya Pagerwesi I (melaksanakan persembahyangan dalam rangka memohon kekuatan spiritual peneguhan *sradhai/iman*), Hari Raya Siwaratri (melaksanakan *Mona Brata*, *Upawasa/Puasa*, dan *Jagra* masing-masing 12, 24 dan 36 jam, serta persembahyangan bersama), *Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi 1938 Saka* (melaksanakan upacara *Tawur Agung Guna Pembersihan Bhuana Alit dan Bhuana Agung/ Miro dan Makrokosmos*), Hari Raya Nyepi 1938 Saka (Libur Nasional: melakukan *Catur Bratha Nyepi*), *Ngembak Geni Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1939* (melaksanakan persembahyangan dilanjutkan *Dharma Santi/Simakrama*), Hari Raya Galungan I (Melaksanakan persembahyangan dalam rangka memperingati kemenangan *Dharma* melawan *Adharma*), Hari Raya Kuningan I (melaksanakan persembahyangan untuk penghormatan kepada para pendahulu(pahlawan dan leluhur) dan rasa syukur atas anugerahnya dalam wujud kesadaran spiritual), Hari Raya Saraswati II (melaksanakan persembahyangan dalam rangka memperingati turunnya Weda), Hari Raya Pagerwesi II (melaksanakan persembahyangan dalam rangka memohon kekuatan spiritual peneguhan *Sradha*), Hari Raya Dipawali (hari kemenangan *Dharma*), Hari Raya Galungan II (melaksanakan persembahyangan dalam rangka memperingati kemenangan *Dharma* melawan *Adharma*), dan Hari Raya Kuningan II (melaksanakan persembahyangan untuk penghormatan kepada para pendahulu (pahlawan dan leluhur) dan rasa syukur atas anugerahnya dalam wujud kesadaran spiritual).

secara resmi dijadikan sebagai libur nasional juga mengalami proses dari masa awal Orde Baru yang melarang warga Tiongho mengekspresikan kebudayaan dan regiusitasnya sampai dengan 2003 Presiden Megawati meresmikannya. Sebelumnya Presiden Abdurrohman Wahid sudah memulai untuk meresmikannya pada tahun 2000. Pratama (2013) mengkategorikan, bahwa manajemen kurikulum yang inklusif ditandai dengan menerapkan libur fakultatif ini.

#### 8. Kebijakan Pakaian (Seragam) Sekolah

Pakaian seragam peserta didik dalam sekolah dipasang di dinding sekolah. Dalam gambar laki-laki berseragam lengan pendek, baju dimasukkan, dan memakai celana panjang. Sedangkan peserta didik perempuan memakai jilbab, baju lengan panjang dan rok panjang sampai kaki. Ketika penulis konfirmasi ke kepala sekolah, yang membedakan antara muslim dan non-muslim adalah pemakaian jilbab. Alasannya pakaian yang penting memenuhi kesopanan, maksudnya adalah lengan panjang dan rok panjang.

Peserta didik dilarang mengeluarkan baju, tidak memakai dasi biru dan cokelat almamater, tidak memakai ikat pinggang SMANSA, baju terlalu pendek dan tidak dimasukkan (wanita), tidak memakai jaz almamater, tidak memakai topi pada saat upacara bendera, dan celana atau baju terlalu ketat.

Sesekali semua guru dan peserta didik memakai pakaian kebhinnekaan ketika hari ulang tahun sekolah. Biasanya dikemas *fashion show*. Menunjukkan pakaian-pakaian khas daerah. Tidak boleh memakai pakaian pesta, melainkan memakai pakaian adat.

### Profil Kebijakan Sekolah SMA Negeri 5 Mataram

Beberapa kebijakan yang terkait penerapan kebhinnekaan di institusi sekolah, antara lain:

#### 1. Imtaq (Iman dan Taqwa)

Imtaq Pagi dilaksanakan pada (07.15-07.30) sebelum pelajaran dimulai. Imtaq pagi peserta didik Muslim membaca al-Qur'an dan terjemah. Muslim di kelas. Peserta didik lain di ruang yang ditentukan. Jika siang hari, pada istirahat ke-2 peserta didik muslim digiring ke Masjid

Islamic Center yang berada di samping sekolah, sedangkan peserta didik yang beragama lain ke tempat yang ditentukan.

## 2. Organisasi Keagamaan Peserta didik

SMA Negeri 5 Mataram memiliki jumlah peserta didik sebanyak 1.272 terdiri dari beragam agama, antara: Islam (1004 peserta didik), Hindu (230 peserta didik), Budha (2 peserta didik), Katolik (8 peserta didik), dan Protestan (17 peserta didik). Sebagaimana SMAN1 Mataram, di SMAN5 Mataram juga memiliki organisasi keagamaan peserta didik yang berfungsi menjadi motor utama kegiatan keagamaan atau kerohanian di sekolah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Di SMALA hanya ada 3 organisasi, yaitu Komunitas Agama Kristen (Protestan dan Katolik), IKMH (Ikatan Kerohanian Muda Hindu) dan RISMA (Remaja Islam SMALA). Budha tidak ada, dikarenakan jumlahnya Cuma 2 (dua).

### **Komunitas Agama Kristen**

Kegiatan peserta didik Kristen antara lain: yang harian adalah Imtaq pagi dan Imtaq siang di Perpustakaan. Peserta didik membaca kitab dan nyanyian. Adapun yang mingguan bertempat di kelas yang kosong. Pembicara dari luar sekolah, yaitu dari Gereja.

Mereka berharap dapat difasilitasi sekolah. Selama ini hanya memiliki gitar di sekolah. Karena itu, berharap ada alat musik Kajian untuk bernyanyi dan berdoa puji-pujian ketika Imtaq. Di luar sekolah mereka diikat organisasi pemuda Gereja.

Untuk perayaan Natal dilakukan secara bersama dengan pelajar seluruh kota Mataram. Natalnya diadakan Januari, sedangkan Paskahnya di bulan April. Yang mengkoordinis mereka adalah PERGAKRI (Persatuan Guru Kristen). Dengan acara ini dilakukan sekalian melaksanakan Bakti Sosial.

Menurut Bu Ruth pembina agama Kristen, di SMALA sangat tinggi persaudaraannya di sekolah. Namun, harapannya mereka memiliki ruangan khusus untuk agama Kristen. Tidak harus ada Gereja. Cukup ada ruangan yang khusus untuk peserta didik agama Kristen, sehingga kalau hujan tidak tergeser dengan

kelas lain. Selama ini di perpustakaan.

### **IKMH (Ikatan Kerohanian Muda Hindu)**

Kegiatan IKMH terdiri dari harian, mingguan, bulanan, dua bulanan, enam bulanan dan tahunan. Kegiatan harian antara lain Imtaq Pagi dan Imtaq Siang namanya "trisandiah". Kegiatan mingguan antara lain: Trisandia, Mantramguru, Darmowacana (Khutbah), Darmatule (Tanya-jawab). Ada juga eskul membaca Kitab Weda dan eskul Genjek (sejenis tarian, nyanyi yang diiringi musik). Kegiatan bulanan adalah sembahyang di Pura-Pura. Dua bulan sekali Pakemitan (bermalam satu malam di Pura). Yang enam bulan sekali adalah Baksos ke Panti Asuhan berupa makanan, pakaian dan uang. Yang tahunan antara lain: Ogoh-ogoh (parade menyambut tahun baru); Tirtayatra (Ziarah ke Jawa Tengah) dan Darmasanti (mirip halal bi halal disertai dengan pertunjukan budaya). Selain itu ada juga kegiatan yang dilaksanakan di sekolah adalah Pasraman (Pesantren Kilat).

Mereka berharap belajarnya kalau bisa tidak di luar kelas yakni di Res Area, karena terlalu terbuka, sehingga kurang khusyuk atau kondusif. Oleh karena itu, mereka memohon untuk adanya fasilitas atau ruang khusus untuk beribadah di sekolah.

### **RISMA (Remaja Islam SMALA)**

Risma adalah organisasi keagamaan peserta didik SMAN 5 Mataram. Risma berfungsi untuk membantu aktivitas keagamaan peserta didik di sekolah. Kegiatan harian adalah Imtaq Pagi dan Siang yang diisi dengan tadarus dan membaca hadits oleh anggota Risma. Yang mingguan antara lain Tahsin, Tilawah, *Liqo'* (kajian). Adapun yang bulanan adalah RISMA.COM (bersih-bersih masjid. Tiga bulan sekali mereka melaksanakan Baksos.

Setahun sekali, Mereka juga mengadakan program unggulan yaitu Festival Maulid SMALA yang berisi lomba-lomba religius. Program ini dibiayai oleh sekolah dan sponsor luar sekolah. Program yang lain adalah RCC (Risma Charity Cup): semacam *event* atau kompetisi, tetapi hadiahnya disumbangkan

untuk panti asuhan atau orang yang membutuhkan. Ini merupakan program turunan yang sudah biasa dilakukan di sekolah.

### 3. Pelibatan KPUD pada Pemilihan Ketua OSIS

Pemilihan Ketua OSIS merupakan kegiatan yang efektif untuk penanaman pendidikan demokrasi secara praksis di sekolah. Sejak di bangku sekolah peserta didik di SMALA belajar berdemokrasi dalam pemilihan ketua OSIS. Menariknya, di SMALA bekerjasama langsung dengan KPUD Mataram. Mereka melaksanakan pemilu peserta didik seperti pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. KPUD tidak hanya menjadi pembina atau pengarah, melainkan langsung turut serta membimbing panitia pemilihan OSIS. Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS diambil dari perwakilan ekstrakurikuler sebagai partai pengusung. Berbeda dengan SMANSA, di SMALA kepala sekolah tidak turut campur dalam pemilihan atau penentuan calon ketua dan wakil ketua OSIS.

### 4. Upacara Hari Senin

Sebagaimana SMAN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram juga melaksanakan upacara hari Senin. Kegiatan ini berfungsi menanamkan jiwa nasionalisme bagi peserta didik dan warga sekolah yang lain. Untuk meningkatkan rasa dan kualitas nasionalisme berbangsa dan bernegara, maka sekolah selain Bapak dan Ibu Guru yang menjadi pembina upacara, maka biasanya juga mengundang Kapolres, Dandim, BNN, dan Tokoh masyarakat lain yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

### 5. Guru dan Mata Pelajaran Agama

Di SMALA pendidikan Agama bobot materinya adalah 2 SKS. Kebetulan gurunya adalah PNS dan guru tetap. Guru Agama Budha ada dua orang juga PNS. Menurut ketua komite, keunggulan dari SMALA adalah keislamannya yang intens dan keagamaan yang kuat. Di samping itu gurunya juga masih muda-muda, sehingga kreatif dan inovatif. Adapun buku-buku agama yang dirujuk antara lain terbitan Yudistira, Erlangga, dan Tiga serangkai.

### 6. Libur Fakultatif untuk Peserta Didik Hindu

Di SMAN 5 Mataram, melaksanakan

kebijakan “libur fakultatif” untuk agama Hindu sebagaimana SMAN 1 Mataram di atas. Kebijakan ini menjadi ketentuan resmi dari pemerintah. Menurut kepala sekolahnya, kebijakan ini disusun antara dinas pendidikan, MUI NTB, PGI (Persatuan Gereja ndonesia) dan Parisade Agama Hindu. Namun dalam pelaksanaan tetap fleksibel dan harus membuat surat ijin setiap ada kegiatan keagamaan Hindu. Bahkan kepala sekola sempat menyatakan, “kebijakan sekolah tidak ada fakultatif, tergantung hari libur dan tergantung ijin”.

### 7. Pemberlakuan Seragam Sekolah

Kebijakan pakaian seragam sekolah di sekolah negeri, langsung dibuat dari pemerintah daerah. Bahwa seluruh peserta didik yang laki-laki memakai pakaian baju lengan pendek dan celana. Sedangkan yang perempuan memakai lengan panjang dan rok panjang. Bagi yang perempuan tidak harus berjilbab, yang penting rapih dan sopan. Dan menggunakan pakaian sesuai ketentuan sekolah.

### 8. Penanganan Masalah Peserta Didik

Penanganan masalah peserta didik, di SMALA ditangani oleh Wali Kelas yang berfungsi sebagai Pembimbing Akademik bekerjasama dengan BK (Bimbingan Konseling). Jika tidak dapat diselesaikan atau tidak teratasi dengan baik, maka mekanisme penanganan masalah diserahkan kepada Waka Kepeserta didikan. Misalnya, keterlambatan peserta didik diberikan sanksi untuk merangkum buku bacaan, baru kemudian diperbolehkan masuk ke kelas setelah mendapatkan surat ijin masuk dari BK. Masalah perkelahian misalnya, diserahkan kepada Kepeserta didikan.

### 9. Pemberian Beapeserta Didik untuk Peserta Didik Kurang Mampu

Tahun ini ada 15 orang peserta didik yang tidak mampu yang mendapat keringanan biaya pendidikan. Peserta didik tersebut terdiri dari agama Hindu, Kristen dan Islam.

### Relasi Antaraktor

Kebijakan internal dari kedua sekolahan ini telah menunjukkan interpretasi dari fikih kebhinnekaan. Sebagaimana agama secara normatif telah mengakui kebhinnekaan dalam

bermasyarakat. Ketentuan normatif yang diambil dari sumber Al-Qur'an dan sunnah tentang bagaimana mencapai kemaslahatan umat yang majemuk dengan pemahaman dikenal dengan fikih kebhinnekaan. Karenanya perbedaan, baik suku, bahasa, ras, dan agama merupakan sunatullah yang wajib dipahami dan difasilitasi (Anjar, 2014).

### 1. Relasi Internal

Sebenarnya pengelolaan keragaman dalam lingkup sekolah bukan sesuatu yang mudah dilakukan, dimana hal tersebut menuntut kesadaran banyak pihak, mulai dari naradidik, pendidik, dan para pemangku kepentingan di sekolah. Peran para pendidik dan pemangku kepentingan juga sangat penting dalam upaya pengelolaan keragaman. Wawasan pengetahuan dan kreatifitas para guru serta kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh *stakeholders* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya tersebut.

*Pertama*, di SMANSA peran visi kepala sekolah sangat menentukan visi dan kemana arah kebijakan sekolah akan dibawa. Selain itu, sekolah ini adalah sekolah yang berangkat dari masyarakat Mataram. Artinya, SMANSA sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat NTB yang sudah biasa hidup berdampingan antar pemeluk agama. Selanjutnya, kegiatan religiusitas di sekolah dimainkan oleh organisasi keagamaan peserta didik di sekolah yang masing-masing memiliki pembina dan jaringan eksternal keagamaan masing-masing. Di samping itu, komite sekolah juga berperan dalam kebijakan pendanaan kegiatan-kegiatan keagamaan peserta didik.

*Kedua*, di SMALA kebijakan tentang karakter dan pembiasaan peserta didik lebih dominan di tangan Waka kepeserta didikan. SMALA juga merupakan sekolah kedua menjadi favorit masyarakat. Artinya, SMALA adalah miniatur masyarakat Mataram. Kegiatan religiusitas peserta didik SMALA juga dilakukan oleh organisasi keagamaan peserta didik, bahkan pembina terlihat sangat dominan dalam membimbing aktivitas mereka. Komite sekolah berperan dalam kebijakan penentuan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana atau fasilitas yang ada di sekolah.

### 2. Relasi Eksternal

Di Mataram, cukup sulit melihat relasi eksternal yang menyangkut kebijakan penerapan karakter kebhinnekaan peserta didik. Karena, kebhinnekaan di sekolah-sekolah Mataram dalam hal ini SMANSA dan SMALA sama-sama seperti kebhinnekaan itu adalah hal yang niscaya dan alami. Sebagaimana disebut di atas, bahwa aktivitas keagamaan di sekolah digerakkan oleh organisasi-organisasi keagamaan peserta didik.

*Pertama*, di SMANSA ada 5 organisasi keagamaan peserta didik, antara lain: Remus (Remaja Mushola), CSF (*Cristian Students Fellowship*), Kerohanian Katolik, Seksi Puja Bakti Agama Budha, dan KHS (Kerohanian Hindu SMANSA). Di Remus yang menjadi Eskul yang sangat diminati di samping ada Paskibra dan Pecinta Alam adalah salah satu kuncinya terletak pada perkaderan dan alumninya. Alumninya memiliki loyalitas yang tinggi dan masih terikat dalam Irmansa (Ikatan Remus Alumni SMANSA). Berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah maupun Ketua Remus, organisasi ini tidak memiliki afiliasi terhadap aliran tertentu atau kelompok tertentu.

*Kedua*, di SMALA ada 3 organisasi keagamaan peserta didik, yaitu RISMA (Remaja Islam SMALA), Himpunan Remaja Hindu, dan Komunitas Agama Kristen. Di SMALA, jumlah peserta didik Muslim jauh lebih besar daripada di SMANSA. Jumlah Peserta didik juga lebih banyak daripada SMANSA. Tetapi, gedung dan lahan sekolah lebih sempit. Organisasi Budha tidak ada, karena hanya 2 peserta didik. Organisasi Kristen Katolik dan Protestan digabung menjadi Komunitas Agama Kristen. Untuk RISMA memiliki relasi eksternal dengan ROHIS. Jika di sekolah namanya RISMA, namun di jejaring luar sekolah terikat dengan ROHIS. Biasanya kalau pengajian (*liqo'*) pesertanya tidak hanya dari SMALA, tetapi juga mengundang sekolah lain.

Baik SMANSA maupun SMALA, memiliki masalah yang sama dalam kaitannya PPDB kepada Dinas Pendidikan NTB. Sekolah memiliki standar tersendiri dan sistem sendiri dalam penerimaan peserta didik baru, namun pejabat yang ada di Dinas Pendidikan terkenal

melakukan intervensi terhadap sekolah yang menitipkan peserta didik tertentu supaya diterima di SMANSA atau SMALA. Karena kedua sekolah ini termasuk sekolah bergengsi.

### Peta Kebijakan Sekolah

Poin ini menjelaskan peta gambaran kebijakan antar-sekolah yang diteliti, setidaknya menggambarkan persamaan dan perbedaan kebijakan antara sekolah dan dapat mengelompokkan temuan antara sekolah SMAN 1 Mataram dan SMAN 5 Mataram.

**Tabel 1.** Peta Kebijakan Sekolah antara SMAN 1 Mataram dan SMA 5 Mataram

Kebijakan	SMAN 1 M	SMAN 5 M
Imtaq	Pagi, Siang, dan Jumat	Pagi, Siang, dan Jumat
Fasilitas	Muslim di Mushola, Non Muslim di Kelas dan Perpus	Muslim di Mushola, Non Muslim di Kelas dan Perpus
Organisasi Peserta didik	Remus (Remaja Mushola), CSF (Cristian Students Fellowship), Kerohanian Katolik, Seksi Puja Bakti Agama Budha, dan KHS (Kerohanian Hindu SMANSA).	RISMA (Remaja Islam SMALA), Himpunan Remaja Hindu, dan Komunitas Agama Kristen.
Seragam	Model sama, muslim dan non-muslim hanya berbeda di Jilbab	Model sama, muslim dan non-muslim hanya berbeda di Jilbab
Libur Fakultatif	Ijin dulu menggunakan surat	Ijin dulu menggunakan surat
Pemilihan OSIS bersama KPUD	Kriteria Calon: Akademik, Ijin Orang Tua, dan Pandangan Guru	Kriteria Calon: Ekstrakurikuler sebagai Partai (kendaraan pencalonan)
Upacara Hari Senin	Mengundang Tokoh	Mengundang Tokoh
Guru Agama	Guru Islam, Kristen, Hindu, Budha PNS Tetap dan Honoror (2 Guru Islam).	Guru Hindu, Islam, dan Kristen PNS Tetap (khusus Budha 2 orang ikut pelajaran ke SMANSA)

### Kesimpulan

Keragaman atau kebhinnekaan di SMAN1 dan SMAN5 adalah hal yang niscaya dan alami di Mataram. Fokus penelitian ini adalah melihat keragaman agama yang ada di SMAN 1 maupun SMAN 5. Hal ini menyebabkan tidak cukup komprehensif untuk menyebutnya sebagai miniatur Indonesia. Masih ada satu agama yang tidak tercakup, yaitu Konghucu. Namun demikian, karakter toleransi antar empat agama yang ada di sekolah tersebut cukup untuk dijadikan model kebijakan internal sekolah dalam merespons kebhinnekaan.

Setidaknya, hasil penelitian ini memberi inspirasi di sekolah umum lainnya untuk menetapkan kebijakan yang pro-kebhinnekaan. Dari pengalaman kedua sekolah di Mataram ini, maka dapat disimpulkan perlunya menyusun beberapa kebijakan yang memperkuat kebhinnekaan di sekolah.

*Pertama*, sekolah menyusun kegiatan Imtaq sebagai bentuk pembiasaan untuk penguatan komitmen atau fanatisme (positif) terhadap agamanya, sehingga peserta didik menjadi manusia yang bertuhan, sekaligus berkemanusiaan. *Kedua*, sekolah menetapkan kebijakan adanya organisasi keagamaan peserta didik di sekolah, selain OSIS. *Ketiga*, sekolah menyediakan fasilitas peribadatan kepada peserta didik dan guru apapun agamanya. Fasilitas bisa berupa tempat dan perlengkapan ibadah lainnya. *Keempat*, sekolah menanamkan pendidikan demokrasi sejak dini melalui pemilihan OSIS sebagai warga negara muda yang kelak akan menjadi pemilih pemula. *Kelima*, sekolah menetapkan kebijakan libur fakultatif untuk semua agama dapat merayakan atau melaksanakan ibadahnya.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Maarif Institut sebagai penyandang dana dalam riset ini. Tidak lupa kepada pihak SMAN 1 Mataram dan SMAN 2 Mataram yang telah mengizinkan dan kooperatif dengan adanya penelitian ini.[]

### Daftar Pustaka

- Anas, M. (2019). Menyemai Nalar Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural. *JIPPK*, 4 (1), 128–140. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p128-139>
- Anjar, N. (2014). Fikih Kebhinnekaan: Membangun Harmoni Antar-Umat Beragama. *Jurnal Maarif*, 9 (2), 127–139. <http://digital.library.ump.ac.id/id/eprint/690>
- Ayuanita, S. I. (2017). *Pengaruh Permainan Outbound Terhadap Tingkat Kepedulian Lingkungan di Sekolah* [Universitas

- Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/33420/>
- BPS. (2020). *Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut, 2018*. Badan Pusat Statistik. <https://ntb.bps.go.id/subject/108/agama.html#subjekViewTab3>
- Desfandi, M., Maryani, E., & Disman. (2017). Implementasi Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan Sebagai Upaya Mengembangkan Literasi Ekologis Peserta Didik. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 4 (2), 30–38. <https://doi.org/10.15408/sd.v4i2.7989>
- Effendi, H., Aisyah, S., Musparidi, Sahnan, M., & Muslim, H. (2019). Analisis Karakteristik Mahasiswa dalam Model Pembelajaran Sejarah Islam Berbasis Kebhinnekaan (PSI-BK) Sebagai Daya Tangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 7 (4), 305–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1414>
- Haryati, T., Suciptaningsih, O. A., & Abdullah, G. (2020). Implementasi Ajaran Ki Hajar Dewantara Sebagai Media Pendidikan Karakter Bagi Siswa SMP N 2 Semarang. *Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP) Tahun 2020 "Inovasi Penelitian Di Masa Dan Pasca-Pandemi,"* 449–462. <http://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/1235/893>
- Isnaeni, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan di SMP Negeri 3 Gresik. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1 (2), 166–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jkpp.v1i2.1565>
- Israpil. (2021). Narasi Kebangsaan dalam Bingkai Kebhinnekaan Peserta Didik MAN 1 Mamuju. *Educandum*, 7 (1), 54–70. <https://blamakassar.e-journal.id/educandum/article/view/488/322>
- Kholis, N. (2019). Pertautan Agama dan Budaya dalam Keislaman Komunitas PITI Jepara. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14 (1), 82–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.82-91>
- Kurniawan, A. R., Chan, F. C., Sargandi, M., Yolanda, S., Karomah, R., Setianingtyas, W., & Irani, S. (2019). Kebijakan Sekolah dalam Alam Penggunaan Gadget di Sekolah Dasar. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2 (2), 72–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i1.195>
- Moleong, L. J. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosdakarya.
- Pratama, H. Y. (2013). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Inklusif (Studi Kasus di SMK Negeri 2 Malang)* [Universitas Negeri Malang]. <http://repository.um.ac.id/3561/>
- Qawaid. (2013). Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Dialog*, 36 (1), 71–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.82>
- RadarLombok. (2021). *Inilah Lima Sekolah Terbaik di NTB Versi LTMPT*. Radar Lombok. <https://radarlombok.co.id/inilah-lima-sekolah-terbaik-di-ntb-versi-ltmpt.html>
- SIMAS. (2022). *Hasil pencarian Masjid di Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Kementerian Agama. <https://simas.kemenag.go.id/page/search/masjid/18/>
- Solihuddin, M. (2013). Dampak Kebijakan Sekolah tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa dalam Membentuk Perilaku Siswa yang Berkarakter. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1 (1), 62–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jkpp.v1i1.1510>
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Supardi, J. S., & Rahmelia, S. (2020). Hubungan Kebermaknaan Hidup dan Sikap Toleransi Beragama pada Siswa Sekolah Menengah Atas Berbasis Keagamaan di Palangka Raya. *Dialog*, 43 (1), 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.345>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal*

*Bimas Islam*, 12 (2), 323–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>

Taufan, J., & Mazhud, F. (2014). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP)*, 14 (1), 62–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpp.v14i1.3213>

Widiyanarti, T. (2017). Pengajian Al Quran sebagai Perekat Kebhinnekaan (Kajian Pola Komunikasi dalam Pengembangan Nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat Multikultural melalui Pengajian Al Quran di Medan, Sumatera Utara). *Nyimak: Journal of Communication*, 1 (1), 1–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v1i1.271>